**EFEKTIVITAS DALAM MENJAGA EKOSISTEM DI SUNGAI
DESA MERABUAN PERSPEKTIF PERATURAN DESA MERABUAN
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG LARANGAN MENYETRUM,
MERACUN DAN MENGEBOM IKAN DAN UDANG
DI SUNGAI DI WILAYAH DESA MERABUAN**

Doni Hermawan

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Corresponding Author: e-mail: donihermawan.6399@gmail.com

Tamrin

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: tamrinmuchsin69@gmail.com

Zainal Amaluddin

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: zainalamaludin@gmail.com

ABSTRACT

Village Regulations (Perdes) are statutory regulations discussed and agreed upon by the Village Head together with the Village Consultative Body (BPD), which are then stipulated by the Village Head. Such as Merabuan Village Regulation Number 4 of 2020 concerning the Prohibition of Electrocuting, Poisoning and Bombing Fish and Shrimp in Rivers in the Merabuan Village Area. This village regulation was formed starting from community reports regarding the widespread electrocution activities in the Merabuan Village River which caused most of the community to suffer losses from these electrocution activities. The problem formulation in this research is: What is the effectiveness in maintaining the ecosystem in the Merabuan Village river from the perspective of Merabuan Village Regulation Number 4 of 2020 concerning the Prohibition of Electrocuting, Poisoning and Bombing Fish and Shrimp in Rivers in the Merabuan Village Area and what are the inhibiting and supporting factors in maintaining it? ecosystem in the river of Merabuan Village, perspective of Merabuan Village Regulation Number 4 of 2020 concerning the Prohibition of Electrocuting, Poisoning and Bombing Fish and Shrimp in Rivers in Village Areas Merabuan. This research uses qualitative research. Qualitative research is a research method based on perceptions of a phenomenon with a data approach that produces descriptive analysis in the form of verbal sentences from the research object. To obtain the necessary data, researchers used observation and interview guidelines. Based on the research results obtained, the effectiveness in maintaining the ecosystem in the Merabuan Village River from the perspective of Village Regulation Number 4 of 2020 concerning the Prohibition of Electrocuting, Poisoning and Bombing Fish and Shrimp in Rivers in the Merabuan Village Area has been effective. Due to the passage of time after the enactment of the Merabuan Village Regulation, no

Merabuan Village residents were found to have violated these regulations, and public awareness has increased about the importance of protecting ecosystems, especially river ecosystems. As well as increasing catches from fishermen in the Merabuan Village River. And the inhibiting factor is the people's ignorance of the Village Regulation and the people's habit of catching fish using electrocution equipment. Meanwhile, the supporting factors are the existence of a Village Regulation prohibiting electric shocks as a legal basis for the community, the support given by the community after the issuance of the Village Regulation prohibiting electric shocks, increasing public awareness about the importance of protecting the river ecosystem, as well as the solidarity of the Merabuan Village community in protecting the ecosystem in the Merabuan Village River.

Keywords: Effectiveness, Ecosystem, Village Regulations

ABSTRAK

Peraturan Desa (Perdes) merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa bersama Badan Permasyarakatan Desa (BPD), yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa. Seperti Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan. Dimana Perdes ini terbentuk berawal dari laporan masyarakat terkait maraknya kegiatan penyetruman di Sungai Desa Merabuan yang menyebabkan sebagian besar masyarakat dirugikan dari kegiatan penyetruman tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana efektivitas dalam menjaga ekosistem di sungai Desa Merabuan perspektif Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan dan apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam menjaga ekosistem di sungai Desa Merabuan perspektif Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan observasi dan pedoman wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat, bahwa efektivitas dalam menjaga ekosistem di Sungai Desa Merabuan Perspektif Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan telah berjalan dengan efektif. Dikarenakan dengan berjalannya waktu setelah di tetapkannya Perdes Merabuan ini, sudah tidak ditemukannya masyarakat Desa Merabuan yang melanggar peraturan tersebut, dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem terutama ekosistem sungai. Serta meningkatnya hasil tangkapan dari para nelayan di Sungai Desa Merabuan. Dan yang menjadi faktor penghambatnya dikarenakan ketidaktahuan masyarakat akan Perdes tersebut dan kebiasaan masyarakat dalam

menangkap ikan menggunakan alat setrum. Sedangkan yang menjadi faktor pendukungnya yaitu adanya Perdes larangan menyetrum sebagai landasan hukum bagi masyarakat, dukungan yang diberikan oleh masyarakat setelah diterbitkannya Perdes larangan menyetrum, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem sungai, serta kekompakan masyarakat Desa Merabuan dalam menjaga ekosistem di Sungai Desa Merabuan.

Kata Kunci: Efektivitas, Ekosistem, Peraturan Desa

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar dan wilayah yang dimiliki oleh Indonesia juga sangat luas. Besarnya kepulauan Indonesia tidak hanya di Asia, melainkan yang terbesar di Dunia. Hal yang membuktikan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Dunia yaitu tercatat jumlah pulau yang dimiliki Indonesia mencapai 17.499 pulau. Dari jumlah tersebut, 13.446 pulau yang sudah memiliki nama, tetapi hanya 6.000 pulau yang berpenghuni (Leo, dkk, 2021).

Indonesia yang disebut-sebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, juga memiliki laut yang sangat luas. Luas laut Indonesia yang besar membuatnya memberikan manfaat yang besar juga. Salah satunya yaitu banyak terdapat sumber daya kelautan dan perikanan di perairan Indonesia. Sumber daya kelautan dan perikanan ini dapat dimanfaatkan oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya. Pernyataan ini termuat dalam Pasal 33 Angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (UU NO 75 1959).

Pengelolaan sumber daya perairan Indonesia harus dilakukan dengan pendekatan integrative yang meliputi aspek konservasi, proteksi, dan pemanfaatan berkelanjutan. Tujuan ini supaya sumber daya perairan Indonesia dapat dipergunakan untuk kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Banyaknya sumber daya di perairan Indonesia terutama sumber daya perikanan. Dari hal ini, ada pihak asing yang berusaha untuk menikmati sumber daya Indonesia secara *legal* maupun *illegal*. Secara *illegal* ini dikenal dengan *illegal fishing* yang dilakukan oleh sebagian besar nelayan-nelayan negara asing, yang memasuki perairan Indonesia dengan cara *illegal* (Anindita, dkk, 2022).

Dan yang dimaksud dengan *illegal fishing* adalah kegiatan menangkap ikan yang bertentangan dengan hukum. Kegiatan *illegal fishing* merupakan cara menangkap ikan yang bertentangan dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan terhadap UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Penangkapan ikan yang bertentangan dengan undang-undang bisa menyebabkan laut tercemar. Pencemaran air laut bisa berdampak serius, dimulai dari bentuk partikel mikroskopis kemudian dikonsumsi oleh plankton serta makhluk laut di dasar laut. Pencemaran air laut diakibatkan masuknya partikel kimia, limbah industri, bahan kimia berbahaya, aktivitas pertanian, dan pemukiman ke dalam perairan laut (Irene, 2020).

Dampak yang dihasilkan oleh pencemaran air laut adalah dimana pencemaran ini signifikan berdampak pada ekosistem laut dan biota laut. Namun, rusaknya ekosistem juga berdampak pada manusia. Seperti, ikan yang telah tercemar kemudian ditangkap oleh nelayan. Setelahnya ikan di jual bahkan dikonsumsi, secara tidak langsung bakteri yang ada pada ikan akan terjangkit pada manusia (Akbar, 2023).

Pemerintah Desa Merabuan menerima laporan dari masyarakat terkait dampak lingkungan dan kesehatan akibat kegiatan penangkapan ikan dengan cara *illegal fishing* di Sungai Merabuan. Serta Pemerintahan Desa Merabuan sudah melakukan tindakan seperti yang bersangkutan dipanggil ke kantor desa merabuan dan diberikan teguran agar tidak melakukan kegiatan menangkap ikan dengan cara menyetrum dan meracun. Tetapi, tidak berselang lama yang bersangkutan melakukan lagi kegiatan menyetrum dan meracun di sungai merabuan. Dan juga, kegiatan menyetrum dan meracun tidak hanya dilakukan oleh masyarakat desa merabuan saja, tetapi masyarakat sekitar desa merabuan juga melakukan kegiatan menyetrum dan meracun di sungai desa Merabuan.

Dari data sebelum dilakukannya penelitian, masih terindikasi adanya warga yang melakukan penyetruman, meracun dan mengebom ikan dan udang di Sungai wilayah Desa Merabuan. Yang mana menyebabkan ekosistem di Sungai Desa Merabuan bisa rusak. Rusaknya ekosistem sungai membuat masyarakat yang mata pencahariannya sebagai nelayan menurun.

Berdasarkan pendahuluan di atas, peneliti merasa tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dan menyusunnya dalam bentuk penelitian yang berjudul “Efektivitas Dalam Menjaga Ekosistem Di Sungai Desa Merabuan Perspektif Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun Dan Mengebom Ikan Dan Udang Di Sungai Di Wilayah Desa Merabuan”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu ataupun masyarakat dalam kaitannya dengan hukum (Salim dan Erlies, 2013). *Setting* penelitian adalah uraian tentang subjek dan objek (orang, kelompok, lembaga, dan sebagainya) serta tempat yang diteliti, sekaligus alasan metodologis pemilihan subyek penelitian (Tim Penyusun, 2021).

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber data primer, data ini didapatkan langsung dari responden atau narasumber yang berkompeten dalam memberikan informasi terkait penelitian yang di teliti. Kedua sumber data sekunder, Sugiyono berpendapat bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dimana yang dimaksud adalah tidak dari orang pertama atau tidak secara langsung, melainkan dari orang lain maupun dokumen-dokumen pendukung. Seperti

yang bersumber dari dokumen, buku, jurnal, yang kemudian disaring dan dituangkan ke dalam kerangka pemikiran (Sugiyono, 2008).

Teknik dan alat mengumpulkan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting guna memperoleh data yang sesuai dengan fokus yang akan diteliti. Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa macam teknik pengumpulan data, seperti: teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi.

Alat pengumpulan datanya berupa pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan adalah berupa pertanyaan yang digunakan dalam proses wawancara. Pertanyaan ini sesuai dengan fokus peneliti, agar tujuan penelitian ini terarah. Teknik analisa data dapat dikatakan sebagai proses menyusun data sehingga dapat ditafsirkan. Bagian ini menguraikan tentang proses penyusunan data berupa penggolongan data kedalam kategori, pola atau tema. Cara menganalisa data yang berangkat dari data yang bersifat khusus, peristiwa konkrit kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum (Suharsimi, 2013).

Teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan pada penelitian kualitatif. Dimana tidak hanya digunakan untuk menyanggah apa yang telah dituduhkan kepada konsep penelitian kualitatif. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu, memperpanjang masa observasi, triangulasi (Arnild, Vol.12, 2020).

PEMBAHASAN

A. Efektivitas

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas dapat diartikan sebagai situasi di mana telah searah dengan target tujuan yang akan dilalui atau diharapkan (Soerjono, 1985). Ada juga yang menyatakan sebuah hukum itu efektif apabila warga masyarakat bertingkah sesuai dengan yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Salah satu cara yang dilakukan supaya efektivitas hukum dapat dipatuhi oleh masyarakat, serta searah dengan kaidah hukum adalah dengan diberikannya sanksi. Sanksi-sanksi ini dapat berupa sanksi negatif maupun sanksi positif.

Ronny Hanintjo Soemitro mengutip Metzger sebagai upaya untuk menentukan seberapa efektif atau tidaknya sebuah sistem hukum di dalam kehidupan masyarakat: (Ronny, 1989)

1. Seberapa mudah atau tidaknya nilai atau isi aturan hukum itu dimengerti.
2. Sebagian besar masyarakat yang mengerti aturan sebuah hukum yang relevan.
3. Pengarahan aturan hukum yang efektif dan efisien dapat dilakukan dengan bantuan pemerintah serta warga masyarakat yang harus berpartisipasi dalam pengarahannya.
4. Adanya metode penyelesaian sebuah sengketa yang mudah diakses serta efektif untuk menyelesaikan sengketa.
5. Adanya kepercayaan dan pengakuan yang sama di dalam anggota masyarakat bahwa aturan dan institusi hukum memang milik mereka.

Menurut Peters yang dikutip oleh Ronny Hanitiyo Soemitro, menjelaskan bahwa fungsi dari hukum memiliki tiga perspektif, yaitu: (Ronny, 1985)

1. Perspektif kontrol sosial daripada hukum.
2. Perspektif sosial *engineering*.
3. Perspektif emansipasi masyarakat daripada hukum.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum itu sendiri menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang dapat menjadi tolak ukur sebuah efektivitas dalam penegakan sebuah hukum. Lima faktor ini yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soerjono, 2007).

Berlakunya suatu hukum apabila terdapat landasan di dalamnya. Dalam hal ini terdapat tiga landasan dari keberlakuan hukum, yaitu:

1. Secara yuridis

Keberlakuan hukum secara yuridis adalah norma yang berlaku dan ikatannya bersifat umum dengan mempertimbangkan suatu teknik yuridis. Bahwa landasan yuridis merupakan sebuah peraturan yang mana telah ditetapkan menurut cara data yang sah dan secara tegas tidak dicabut maupun dikesampingkan oleh sebuah aturan yang baru (Donald, 2014).

2. Secara sosiologis

Hukum yang keberlakuannya secara sosiologis merupakan hukum yang hidup di dalam masyarakat, yang mana dipraktikkan oleh masyarakat karena dipandang baik untuk kepentingan masyarakat.

3. Secara filosofis

Menurut Jimmy Asshiddiqie, keberlakuan hukum secara filosofis dikatakan jika norma tersebut sudah cocok dengan nilai-nilai filosofis yang diterapkan oleh negara. Dalam rumusan Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas berbangsa dalam ikatan kebhineka-tunggal-ika, kerakyatan dan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia (Jimmy, 2015).

B. Ekosistem

Ekosistem ini melibatkan pengaruh timbal balik antar organisme dan lingkungan fisik yang menyebabkan aliran energi menuju pada sebuah struktur biotik tertentu dan terjadilah siklus materi antar organisme dan anorganisme. Matahari yang merupakan sebagai sumber dari semua energi di dalam ekosistem. Dimana organisme pada suatu komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai sebuah sistem. Organisme ini kemudian beradaptasi dengan lingkungan fisiknya, dan juga lingkungan fisik akan dipengaruhi oleh organisme demi kelangsungan hidupnya.

Menurut A.G. Tansley, ekosistem sebagai suatu unit ekologi yang mana didalam ekosistem tersebut terdapat sebuah struktur dan fungsi didalamnya. Struktur yang terdapat di dalam ekosistem sangat berhubungan dengan keanekaragaman spesies, atau biasa dikenal dengan sebutan *species diversity*. Pada sebuah ekosistem yang strukturnya kompleks, maka keanekaragaman spesies akan cukup tinggi. Sedangkan fungsi dari ekosistem adalah hubungannya dengan sebuah siklus materi, yang mana arus energi melewati komponen ekosistem (Nandy, 2024).

Komponen ekosistem adalah bagian dari sebuah ekosistem yang menyusun ekosistem ini sendiri, sehingga membuat sebuah ekosistem. Komponen dalam ekosistem ini dibagi menjadi dua, yaitu komponen hidup dan komponen tidak hidup. Komponen hidup ini dikenal dengan komponen biotik dan komponen tidak hidup dikenal dengan komponen abiotik (Nandy, 2024).

Adapun jenis-jenis ekosistem yaitu ekosistem air, ekosistem darat dan ekosistem buatan (Nandy, 2024).

1. Ekosistem air, adalah ekosistem yang sebagian besar komponen abiotiknya terdiri dari air.
2. Ekosistem darat (*teseterial*), adalah ekosistem yang tempatnya berada di daratan. Dimana ekosistem darat dalam penentuan zonanya ditentukan dari temperatur dan curah hujan.
3. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk keperluan dalam memenuhi kebutuhannya. Dimana subsidi energi dari ekosistem ini diambil dari luar, tumbuhan atau hewan peliharaan yang banyak dipengaruhi oleh manusia, serta keanekaragaman yang dimilikinya rendah.

C. Peraturan Desa

Berdasarkan yang termuat dalam Pasal 69 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, jenis peraturan di Desa terdiri dari tiga jenis yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa (UU No 6 2014).

1. Peraturan desa

Peraturan Desa (Perdes) merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa. Dalam menjalankan suatu peraturan di desa terdapat peran pemerintahan desa, seperti kepala desa dan BPD yang selalu berperan penting dalam pembangunan desa. Dalam sebuah pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas ini termuat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Pada undang-undang ini, yang menjadi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah sebagai berikut: Asas kejelasan tujuan, Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, Asas dapat dilaksanakan, Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, Asas kejelasan rumusan, Asas keterbukaan (UU No 13 2022).

2. Peraturan bersama kepala desa

Peraturan bersama Kepala Desa termuat dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dimana Peraturan bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa untuk melakukan kerja sama antar desa. Kerja sama antar desa ini merupakan perpaduan kepentingan masing-masing tiap desa. Untuk mempercepat suatu pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat desa, desa dapat mengadakan kerja sama antar desa.

Kerjasama yang dapat dilakukan oleh desa mempunyai dua bentuk, yaitu kerjasama dengan desa lain atau kerjasama dengan pihak ketiga.

Kerjasama antar Desa yang dilakukan oleh BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) dibentuk dengan cara kesepakatan dalam Musyawarah Antar Desa. Anggota BKAD ini berasal dari utusan desa-desa yang bersepakat melakukan kerjasama. Utusan tersebut meliputi:

- a. Perangkat desa;
- b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- d. Lembaga Desa lainnya;
- e. Tokoh Masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Kualitas suatu produk hukum dapat ditentukan dari proses pembuatannya. Oleh sebab itu, dalam langkah penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Langkah musyawarah desa yang melahirkan saran kerjasama antar desa;
- b. Penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa (MAD);
- c. Pembahasan draft rancangan Peraturan Bersama; dan
- d. Langkah penyebarluasan atau sosialisasi Peraturan Bersama.

3. Peraturan kepala desa

Peraturan kepala desa termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, dimana Peraturan Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dan sifatnya mengatur. Dimana peraturan kepala desa adalah sebuah produk hukum di desa. Kewenangan pembentukan serta penetapannya dilakukan oleh kepala desa berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Peraturan Kepala Desa memiliki fungsi sebagai peraturan pelaksana dari sebuah Peraturan Desa. Peraturan Kepala Desa hanya boleh mengatur hal-hal yang secara konkret diperintahkan di dalam Peraturan Desa. Karena demikian, kepala desa tidak bisa mengatur hal yang dilarang oleh Peraturan Desa. Hal ini merupakan sebuah pembatasan terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh seorang kepala desa. Namun, pada posisinya kepala desa merupakan pelaksana tertinggi dalam Peraturan Desa (Lusina, 2022).

Peraturan Kepala Desa ini memuat apa saja materi yang menjadi kewenangannya atau materi yang diperintahkan ataupun didelegasikan dari sebuah peraturan yang lebih tinggi. Tetapi, Peraturan Kepala Desa masih dapat mengatur materi yang tidak termuat dan Peraturan Desa. Namun materi tersebut harus tetap diperintah oleh peraturan yang lebih tinggi, seperti diperintah oleh Undang-Undang, atau Peraturan Pemerintah yang bahkan Peraturan Daerah. Dengan kata lain Peraturan Kepala Desa memiliki substansi yang bebas yang akan diatur, tetapi harus mempunyai dasar hukum untuk melakukan pengaturan materi tersebut (Rizal, 2021).

D. Efektivitas dalam menjaga Ekosistem di Sungai Desa Merabuan
Perspektif Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan

Richard M Steers mengemukakan bahwa efektivitas merupakan sebuah cakupan usaha tertentu suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk menggapai tujuan dan sasarannya tanpa menghalangi cara dan sumber daya tersebut, serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya (Richard, 1985).

Berdasarkan Pasal 4 Angka 4 dalam Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan, dijelaskan bahwa "*Seluruh masyarakat Desa Merabuan tanpa terkecuali berkewajiban menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian ekosistem yang ada di Sungai*". Dimana sebelum diterbitkannya Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan, masyarakat menangkap ikan dengan cara menyetrum atau menggunakan alat setrum, hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Suwirman selaku Sekretaris Desa Merabuan yang menjadi Informan dalam penelitian ini mengatakan "*karena banyaknya aduan dari masyarakat yang merasa dirugikan dari tindakan menangkap ikan dengan cara setrum*" (Perdes No 4 2020).

Dari kegiatan penyetruman ini akan sangat berdampak terhadap masyarakat. Dimana selain dapat merusak kelangsungan makhluk hidup di dalam air, juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Dengan adanya Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan, ekosistem di Sungai Desa Merabuan mengalami peningkatan. Dimana sebelum adanya Perdes ini, banyaknya masyarakat yang melakukan penyetruman ikan serta sedikitnya hasil tangkapan ikan yang diperoleh para nelayan di Sungai Desa Merabuan.

Dari pernyataan yang diberikan Informan di atas serta diperkuat oleh beberapa pernyataan masyarakat Desa Merabuan yang kebetulan bercerita dan mengungkapkan perihal tersebut. Jadi efektivitas dalam menjaga ekosistem di Sungai Desa Merabuan perspektif Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan, dapat dikatakan sudah berjalan dengan efektif. Karena tidak ditemukannya lagi masyarakat Desa Merabuan yang melakukan penyetruman, meracun maupun mengebom di Sungai Desa Merabuan, serta meningkatnya hasil tangkapan dari para nelayan di Sungai Desa Merabuan.

E. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam menjaga Ekosistem di Sungai Desa Merabuan Perspektif Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan

Faktor penghambat adalah keadaan atau peristiwa yang menghalangi tercapainya suatu tujuan. Lalu yang menjadi faktor penghambat dalam menjaga ekosistem di Sungai Desa Merabuan perspektif Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan, berdasarkan hasil wawancara yang di dapat yaitu ketidaktahuan

masyarakat dengan Perdes tersebut dan masyarakat yang sudah terbiasa menangkap ikan dengan cara menyetrum.

Faktor pendukung merupakan keadaan atau peristiwa yang mendukung supaya tercapainya suatu tujuan. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam menjaga ekosistem di Sungai Desa Merabuan perspektif Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan, berdasarkan hasil wawancara yang di dapat yaitu adanya Perdes larangan menyetrum sebagai landasan hukum bagi masyarakat, dukungan yang diberikan oleh masyarakat setelah diterbitkannya Perdes larangan menyetrum, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem sungai, serta kekompakan masyarakat Desa Merabuan dalam menjaga ekosistem di Sungai Desa Merabuan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti mengenai Efektivitas Dalam Menjaga Ekosistem di Sungai Desa Merabuan Perspektif Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan, maka peneliti tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa efektivitas dalam menjaga ekosistem di Sungai Desa Merabuan perspektif Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan sejak di undangkannya peraturan ini sampai saat dilakukan penelitian, dapat dikatakan sudah berjalan dengan efektif. Dikarenakan dengan berjalannya waktu setelah di tetapkannya Perdes Merabuan ini, sudah tidak ditemukannya masyarakat Desa Merabuan yang melanggar peraturan tersebut, dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem terutama ekosistem sungai. Serta meningkatnya hasil tangkapan dari para nelayan di Sungai Desa Merabuan.
2. Bahwa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam menjaga ekosistem di Sungai Desa Merabuan perspektif Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan yaitu faktor penghambatnya dikarenakan ketidaktahuan masyarakat akan Perdes tersebut dan kebiasaan masyarakat dalam menangkap ikan menggunakan alat setrum. Sedangkan yang menjadi faktor pendukungnya yaitu adanya Perdes larangan menyetrum sebagai landasan hukum bagi masyarakat, dukungan yang diberikan oleh masyarakat setelah diterbitkannya Perdes larangan menyetrum, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem sungai, serta kekompakan masyarakat Desa Merabuan dalam menjaga ekosistem di Sungai Desa Merabuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muh dan Aqila Maghfira. (2023). "Pengaruh Sampah Plastik dalam Pencemaran Air Laut di Kota Makasar." *Jurnal Riset Sains dan Teknologi Kelautan* Vol. 6, No. 1: 25-29.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimmy. (2015). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bebhe, Lusina Helda Lili. (2022). "Dinamika Hubungan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam Perumusan Peraturan Desa." Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbaini. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kepala Desa Merabuan. (2020). Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan, No. Lembaran Desa Merabuan Tahun 2020 Nomor 4.
- Mariane, Irene. (2020). "Illegal Fishing di Kawasan Perbatasan Laut Teritorial Indonesia." *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 16, No. 1: 7-15.
- Mekarisce, Arnild Augina. (2020). "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* Vol. 12, Edisi 3: 145-151.
- Naila, Anindita Radya. dkk. (2022). "Tindakan Illegal Fishing di Indonesia dalam Kriminologi." *Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora* Vol. 3, No. 5: 54-60.
- Nandy. "Ekosistem: Pengertian, Komponen dan Macam." *gramedia.com*, <https://www.gramedia.com/literasi/ekosistem>
- Penyusun, Tim. (2021). *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah*. Bengkulu: El-Markazi.
- Rasiddin, Leo. dkk. (2021). "Strategi Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam Pengamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia." *Jurnal Strategi Pertahanan Laut* Vol. 7, No. 3: 220-231.
- Rizal. (2021). "Efektivitas Peraturan Desa Merabuan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Larangan Menangkap, Menampung, Menjual, Membeli Kodok di Wilayah Desa Merabuan." Skripsi, Fakultas Syariah, IAIS Sambas.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1959). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-Undangan. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143.
- Soekanto, Soerjono. (1985). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitiyo. (1989). *Studi Hukum dan Kemiskinan*. Semarang: Tugu Muda.
- Steers, Richard M. (1985). *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.